

## **PENGARUH KONEKSI POLITIK, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Ilma Nursavida<sup>1</sup>, Bambang Wicaksono<sup>2</sup>, Oktavima Wisdaningrum<sup>3</sup>**

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Ilmanursavida19@gmail.com<sup>1</sup>, [yudhisqyla@yahoo.com](mailto:yudhisqyla@yahoo.com)<sup>2</sup>, [oktavima@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:oktavima@untag-banyuwangi.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pengaruh Koneksi Politik, Karakter eksekutif, dan Komite audit terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap koneksi politik, karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Koneksi Politik, Karakter Eksekutif, Komite Audit, Penghindaran Pajak

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of political connections, executive character, and audit committees on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2021. The type of data used in this research is secondary data, namely the financial reports of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 2019-2021. The sample in this study amounted to 12 companies obtained using the Purposive Sampling method. The results of this study show that political connections have no effect on political connections, executive character has no effect on tax avoidance, and audit committees have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Political Connection, Executive Character, Audit Committee, Tax Avoidance*

## 1. Pendahuluan

Penghindaran pajak perusahaan memberi manajer peluang untuk menghindari pajak untuk tujuan nirlaba jangka pendek. Ekspektasi pemegang saham dalam jangka panjang, dan tata kelola perusahaan dianggap memiliki kemampuan untuk mengontrol konsekuensi dari masalah keagenan dalam memerangi penghindaran pajak (Puspita & Harto, 2014). Butje & Tjondro, (2014) percaya bahwa karena perlindungan pemerintah, perusahaan dengan ikatan politik lebih mungkin untuk menghindari pajak, yang memiliki efek mengurangi transparansi pelaporan keuangan utama. Namun, nilai pembayaran pajak perusahaan mengalami penurunan sebagai akibat dari penghindaran pajak, yang menghalangi pemerintah untuk melakukan pembentukan. Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia mungkin terkait dengan adanya *self assessment system*.

Wajib pajak memiliki kemampuan dan keyakinan untuk membagi, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Kejadian ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Meskipun perusahaan menghindari pajak, pemerintah tidak dapat menghukum perusahaan karena tidak ada undang-undang yang dilanggar (Butje dan Tjondro, 2014). Para eksekutif perusahaan harus memutuskan dan memantau semua tindakan yang diambil oleh manajemen yang tepat dan tidak melanggar peraturan yang berlangsung. Namun, di perusahaan antara lain mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) ada pihak lain yang mendukung manajemen.

Koneksi politik adalah cara mengorganisasikan kekuasaan dalam masyarakat yang mencakup prosedur pengambilan keputusan terutama di tingkat lokal. Sugiyarti (2017), menggambarkan hubungan politik sebagai hubungan antara pihak-pihak tertentu yang berkepentingan secara politik sehingga dapat saling komersial.

Dalam literatur ekonomi politik, ditemukan bahwa pilihan strategis perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor politik dan hubungannya dengan kinerja perusahaan (Faccio, 2006; Leuz & Oberholzer-Gee, 2006; Guedhami, et al., 2014) pada (Pratiwi, 2017). Hubungan politik membawa perlakuan khusus bagi bisnis yaitu kemudahan saat meminjam modal, resiko pemeriksaan pajak rendah (Sugiyarti, 2017). Peredaran penghindaran pajak politik diharapkan berfokus pada perusahaan milik negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah (Chen, Tang, Wu dan Yang, 2015). Bisnis dengan koneksi politik cenderung melakukan penghindaran pajak karena ketika bisnis mendapat kepercayaan dari pemerintah, perusahaan yang menjalankan bisnis akan berada di bawah kendali langsung pemerintah, sehingga bisnis akan takut untuk melakukan penggelapan pajak.

Menurut berita yang dilansir Kompas.com, studi penghindaran pajak menunjukkan bahwa penggelapan pajak di Indonesia akan merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun setiap tahun. Laporan *Tax justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of covid-19* melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan kehilangan hingga US \$ 4,86 miliar setiap tahun sebagai akibat dari penghindaran pajak. Dengan kurs rupiah pada penutupan pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dolar AS, ini setara dengan Rp68,7 triliun. Dari jumlah tersebut tidak kurang US \$ 4,78 miliar, atau Rp 67,6 triliun, karena penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara itu, sisanya US \$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik merupakan salah satu bentuk penggelapan pajak. Tokoh politik PT. Adaro Energy, salah satu pemegang saham perseroan dan juga anggota partai politik, adalah tokoh nasional, Sandiaga Uno yang juga wakil direksi partai Gerindra. PT Adaro Energy memiliki penghasilan kena pajak yang rendah karena kasus penghindaran pajak yang terjadi antara tahun 2009 dan 2017. PT Adaro Energy membayar pajak US \$ 125 lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia, seperti yang dilaporkan. Coaltrade Services International, anak usahanya di Singapura bertanggung jawab atas pelaksanaan penggelapan pajak (detikfinance, 2019).

Terjadinya penggelapan pajak karena itu perusahaan dapat dipastikan oleh karakter eksekutif. Pada perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda beda hal ini dipengaruhi salahsatunya yaitu karakter eksekutif. Perbedaan karakter eksekutif yang dimiliki oleh perusahaan dapat menghasilkan keputusan dan kebijakan yang berbeda-beda.

Perusahaan yang mempunyai risiko tinggi maka perusahaan akan cenderung berkarakter pengambil risiko maka eksekutif akan lebih percaya diri untuk membuat kebijakan dengan risiko yang tinggi. Manajer berisiko yang berani melakukan penghindaran pajak akan menarik pengawasan hukum perusahaan dan dapat merusak reputasi perusahaan jika penghindaran pajak dilakukan

sembarangan dan melanggar hukum. Jika pemimpin yang menghindari resiko dan kurang berani mengeluarkan kebijakan yang berdampak tinggi, sehingga mereka berusaha menghindari resiko tinggi (Ummaht dan Indrawan, 2022).

Komite audit merupakan komponen tata kelola perusahaan yang memegang peranan peting dalam peraturan internal organisasi. Komite Audit *Corporate Governance* (CG) bertanggung jawab untuk membantu tim audit yang bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa auditor tidak melakukan kecurangan. Karyawan perusahaan mengawasi etika perusahaan saat beroperasi. Komite audit seharusnya dapat mencegah penghindaran pajak. Menunjukkan bahwa jika jumlah anggota komite audit suatu perusahaan kurang dari 3 atau tidak sesuai dengan peraturan BEI, maka tindakan manajemen untuk memperkecil laba untuk kepentingan perpajakan akan meningkat. Ini menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi perilaku penghindaran pajak.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan publik sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019- 2021 dengan judul “Pengaruh Koneksi Politik, Karakter Eksekutif dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak”.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Agency Theory**

*Agency theory* adalah model yang digunakan untuk membentuk masalah yang timbul antara pemegang saham dan manajemen di perusahaan (Ayu et al., 2017). Dalam teori keagenan, yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah manajer perusahaan. Manajemen diwajibkan untuk melaporkan setiap kinerja kepada Direktur melalui laporan keuangan. Mendelegasikan wewenang kepada agen akan membuat manajemen lebih tahu daripada perwakilan. Prinsipal akan lebih memantau semua tindakan manajemen sehingga manajemen tidak mengambil tindakan semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri. Adanya hubungan tersebut terkadang akan menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham yaitu berusaha untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan lebih cepat atas investasi yang mereka investasikan, sedangkan manajer menginginkan insentif sebesar mungkin atas kinerja mereka dalam mengelola operasi perusahaan.

### **Koneksi Politik**

Koneksi politik yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan secara internal sosial, mengambil bentuk, antara lain, dari proses pengambilan keputusan, khususnya lokal. Istilah lain disampaikan oleh Sugiyarti (2017), Koneksi politik adalah kondisi di mana partai dan pihak-pihak yang berkepentingan secara politik menjalin hubungan untuk kepentingan kedua belah pihak. Dokumen ekonomi politik menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara politik dan kegiatan produksi dan bisnis. Dokumen ini juga memiliki peran penting dalam menentukan strategi bisnis (Faccio, 2006; Leuz & Oberholzer-Gee, 2006; Guedhami, et al., 2014) pada (Pratiwi, 2017). Perusahaan yang terhubung dengan politik menerima perlakuan khusus, seperti kemudahan meminjam dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah (Sugiyarti, 2017). Akibatnya, ia memperkirakan bahwa siklus penggelapan pajak politik terkonsentrasi di antara badan usaha milik negara, terutama yang terkait erat dengan pemerintah (Chen et al., 2015). Karena bisnis dengan koneksi politik mendapat kepercayaan dari pemerintah, mereka akan berada di bawah kendali langsung pemerintah, sehingga mereka takut melakukan penggelapan pajak. Akibatnya, bisnis ini cenderung melakukan penghindaran pajak.

### **Karakter Eksekutif**

Eksekutif atau pemimpin bisnis dengan karakteristik *risk taker* adalah eksekutif atau pemimpin yang lebih percaya diri dalam mengambil keputusan bisnis. Jenis pengambil risiko ini mengambil tindakan yang cukup berani untuk mendapatkan hak atau kekuasaan, kekayaan, status, dan pendapatan yang lebih besar, dan juga bersedia menerima dampak dari risiko yang lebih tinggi. Terdapat perbedaan pada mentalitas *risk averse*, manajer dengan karakteristik *risk averse* seringkali cenderung tidak berani mengambil risiko, sehingga ketika mengambil keputusan lebih memilih risiko dan peluang yang lebih rendah. Eksekutif yang menghindari risiko memprioritaskan keselamatan daripada mencapai pengembalian yang lebih tinggi, tetapi mengambil risiko (Fitria, 2018).

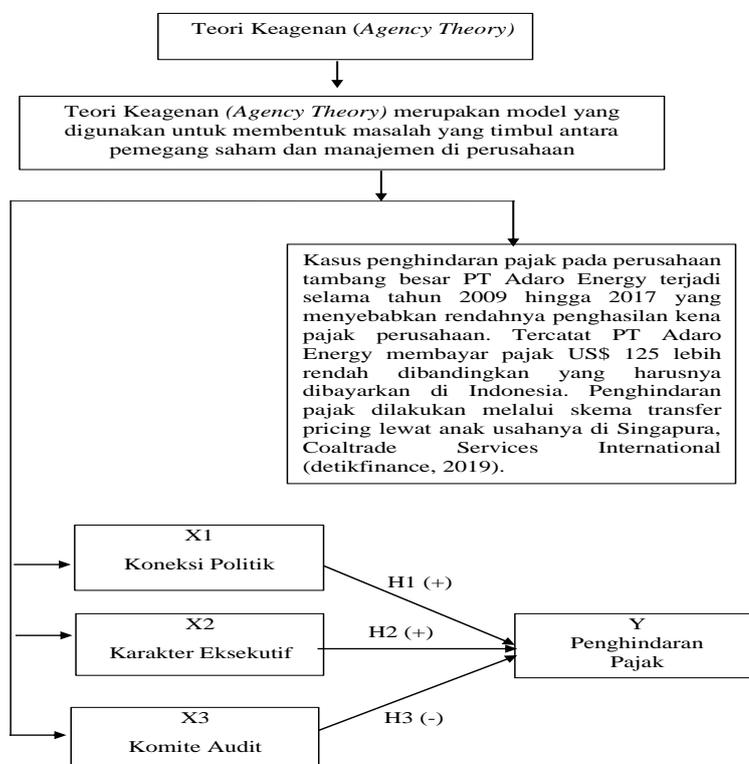
## Komite Audit

Komite Audit merupakan Perusahaan untuk membantu menjalankan peran eksekutif dalam menjalankan perusahaan secara profesional dan mandiri (Pratomo & Rana, 2021). Menurut Wulansari & Mildawati (2018), tugas komite audit adalah memantau transparansi laporan keuangan perusahaan agar berkualitas dan sesuai dengan regulasi. Berdasarkan POJK No. 55/POJK 04/2015 dijelaskan bahwa komite audit membentuk, mengangkat dan dapat memberhentikan komite audit. Komite audit harus terdiri dari paling sedikit tiga orang yaitu komite audit independen yang juga ketua komite audit dan dua orang lainnya adalah orang asing yang netral, berpengetahuan luas dan profesional di bidang akuntansi dan keuangan. Tujuan komite audit adalah untuk membantu menjalankan dan meninjau peran dewan dalam manajemen perusahaan yang profesional dan independen.

## Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah tindakan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak tanpa melanggar peraturan tersebut. Hal tersebut tidak melanggar hukum, namun penggelapan pajak merugikan suatu negara karena penerimaan pajak akan menurun sehingga target penerimaan pemerintah tidak tercapai.

## Kerangka Konseptual



## Pengembangan Hipotesis

### Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik memberi keuntungan bagi perusahaan, yaitu perlindungan dari pemerintah, proses pinjaman yang mudah serta risiko pemeriksaan pajak yang rendah. Sehingga membuat perusahaan lebih agresif dalam penghindaran pajak, yang berujung pada pelaporan keuangan yang kurang transparan (Sahrir et al., 2021). Mengacu pada teori keagenan, pihak eksekutif akan berusaha memaksimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan cara mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Menurut teori keagenan, manajer akan mencoba untuk mengurangi biaya pajak mereka dengan menggunakan koneksi politik yang ada dengan perusahaan, karena perusahaan akan memiliki keuntungan dalam bisnis, yaitu dengan menciptakan pinjaman modal yang menguntungkan dan risiko audit pajak yang rendah. Beberapa peneliti yaitu Sahrir et al. (2021), dan Munawaroh & Ramdany (2020) dalam penelitian ini menemukan bahwa hubungan koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Semakin tinggi ikatan koneksi politik yang terkait

dengan perusahaan, semakin aktif manajer cenderung memaksimalkan keuntungan mereka dengan menghindari pajak.

### **H1: Koneksi Politik Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Karakter Eksekutif adalah jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang memiliki wewenang memutuskan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Keputusan pengambilan kebijakan perusahaan melakukan penghindaran pajak bergantung pada individu eksekutif yang mempunyai dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Karakter eksekutif yang *risk taker* akan membuat tingkat penghindaran pajak perusahaan menjadi semakin tinggi karena nilai cash ETR rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang ada di perusahaan (Butje & Tjondro, 2014). Penelitian (Prastiwa & Ratnasari, 2019, dalam Afriyanti et al., 2019) juga menyatakan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena karakter eksekutif cenderung *risk taker*.

### **H2: Karakter Eksekutif Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memantau proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan oleh manajemen. Konsisten dengan penjelasan tersebut, komite audit memiliki fungsi mengawasi laporan keuangan dan proses pengawasan internal, karena BEI (Bursa Efek Indonesia) mewajibkan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Tanggung jawab komite audit di dalam perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif memantau penipuan atau konflik kepentingan yang dilakukan karyawannya. Oleh karena itu, keberadaan komite audit meminimalisir praktik penghindaran pajak.

### **H3: Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak**

## **2. Metode Penelitian**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **Populasi**

Menurut Sugiyono, (2019: 126) populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari yang terdiri dari objek dan subjek, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Populasi di dalam penelitian ini seluruh perusahaan *mining* (pertambangan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021 yang berjumlah 52 perusahaan.

#### **Sampel**

Menurut Sugiyono, (2019: 127) Sampel adalah sejumlah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan *mining*. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yang menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. laporan Keuangan yang disajikan dalam mata uang Rupiah.
- b. Perusahaan *mining* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2019-2021.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan seperti: buku, jurnal, makalah, internet, dan media pendukung lainnya. Serta informasi data dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI-BEI) yang berada di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi selama tahun 2019-2021. Data dan informasi untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Rostiani & Sukanta (2018) terdiri dari pengumpulan, pencatatan dan *verifikasi* data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dan informasi lainnya yang dapat diakses secara umum.

#### **Jenis Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan *mining* (pertambangan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode

2019-2022. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa angka yang didapat dan diolah dengan rumus.

### **Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran**

Variabel merupakan sesuatu yang difokuskan untuk diteliti dalam sebuah penelitian, sehingga akan menghasilkan informasi mengenai suatu hal dan dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Penjelasan definisi operasional dan pengukuran variabel dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **Koneksi Politik (X1)**

*Political connection*. Variabel ini didefinisikan sebagai seberapa banyak jajaran dewan komisaris atau direksi yang terlibat dalam politik. Perusahaan terkoneksi politik apabila dewan komisaris dan direksi merupakan anggota partai politik, DPR, pejabat militer, atau pejabat kepolisian (Faccio, 2010; Nys et al., 2014).

*Political connection* diukur dengan persentase yang diperoleh dari jumlah dewan komisaris dan direktur yang terlibat dalam *political connection* dibagi total jumlah dewan komisaris dan direktur (Sutopo et al., 2017).

#### **Karakter Eksekutif (X2)**

Karakter eksekutif didefinisikan sebagai karakter-karakter tertentu yang dimiliki oleh setiap pimpinan di level teratas suatu perusahaan. Karakter-karakter tersebut mempengaruhi pimpinan untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Butje dan Tjondro, 2014).

$$\text{Risiko Perusahaan} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

#### **Komite Audit (X3)**

Komite Audit diartikan sebagai pencegahan kegiatan penggelapan pajak, karena komite audit (KA) bertugas membantu direksi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit (KA) mempengaruhi penetapan kebijakan perusahaan. Menurut BEI jumlah komite audit minimal tiga untuk kegiatan keuntungan perusahaan sebagai strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak (Diantari & Ulupi, 2016).

$$\text{KA} = \sum \text{Komite Audit}$$

#### **Penghindaran Pajak (Y)**

Menurut Zain (2008:50) pajak adalah keringanan pajak yang tetap dalam batas-batas hukum perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama dengan cara perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan proses pengendalian tindakan untuk menghindari konsekuensi perpajakan yang tidak diinginkan.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021 yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Pemilihan perusahaan-perusahaan pertambangan sebagai sampel didasari atas pertimbangan bahwa banyak perusahaan yang terdaftar di perusahaan pertambangan masih banyak perusahaan yang mengalami *delisting* atau dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Sehingga besar kemungkinan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di perusahaan pertambangan tidak melakukan pelaporan tanggung jawab sosialnya secara konsisten setiap tahunnya.

#### **Deskripsi Data Penelitian**

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui kuesioner yang telah disebar. Analisis deskriptif meliputi mean, minimum, maximum, median dan standar deviasi jawaban dari responden untuk setiap variabel.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Koneksi Politik	36	,200000000	,666666667	,40079365067	,109937108506
Karakter Eksekutif	36	,007410102	,315710366	,09261018600	,080900038848
Komite Audit	36	2	4	3,22	,485
Penghindaran Pajak	36	,003169484	1,228703645	,47321092758	,360513650756
Valid N (listwise)	36				

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa N atau jumlah data pada variabel adalah 36 data, dari 36 data sampel koneksi politik memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,200000000 terdapat pada PT Timah Tbk (TINS) tahun 2019-2021. Nilai tertinggi (maximum) 0,666666667 terdapat pada PT Mitra Energi Persada dari periode 2019. Diketahui nilai rata-rata sebesar 0,40079365067 serta nilai standar deviasi sebesar 0,109937108506 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Variabel karakter eksekutif, diketahui memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,007410102 terdapat pada perusahaan PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) pada tahun 2019. nilai tertinggi (maximum) sebesar 0,315710366 terdapat pada perusahaan PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) pada tahun 2021. dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,09261018600, serta nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,080900038848 artinya nilai rata-rata dari variabel lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Variabel komite audit, memiliki nilai minimum sebesar 2, terdapat pada perusahaan PT IFISHDECO pada tahun 2021. nilai maximum yaitu 4, terdapat pada perusahaan PT Aneka Tambang (ANTM) pada tahun 2019-2021, PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2019-2021, PT Timah Tbk (TINS) pada tahun 2019-2021. nilai mean sebesar 3,22 serta nilai standar deviasi sebesar 0,485 artinya nilai rata-rata dari variabel lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Variabel penghindaran pajak, diketahui memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,003169484 terdapat pada perusahaan PT Timah (TINS) pada tahun 2020. nilai tertinggi (maximum) sebesar 1,228703645 terdapat pada perusahaan PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) pada tahun 2019. dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,47321092758, serta nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,360513650756 artinya nilai rata-rata dari variabel lebih besar dari nilai standar deviasisehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

## Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual yang diteliti terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji K-S (*Kolmogorov Smirnov*) yaitu dengan taraf signifikan 0,05. Jika diperoleh nilai signifikan data lebih besar dari 0,05 maka data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,31009134
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,096
	Negative	-,074
Test Statistic		,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji K-S (*Kolmogorov Smirnov*) pada tabel 4.2 menunjukkan adanya hubungan yang normal. Diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga data penelitian ini bisa dilanjutkan untuk melakukan pengujian asumsi klasik berikutnya.

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat adanya korelasi antara variabel independen. Model korelasi dapat dikatakan baik apabila tidak ada korelasi antara variabel independen. Mendeteksi adanya multikolinieritas dapat menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF <10 maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi dan begitu juga sebaliknya.

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
Koneksi Politik	,860	1,163
Karakter Eksekutif	,988	1,012
Komite Audit	,869	1,150

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Hasil tabel uji multikolinieritas, menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Dikatakan lolos pengujian apabila nilai sig > 0.05.

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	-.102	.283		-.361	.720
Koneksi Politik	.703	.293	.417	2.401	.022
Karakter Eksekutif	-.177	.371	-.077	-.477	.637
Komite Audit	.026	.066	.067	.386	.702

a. Dependent Variable: ABSRes

Hasil uji Glejser pada tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil signifikansi dari variabel Koneksi Politik sebesar 0,022 > 0,05, variabel Karakter Eksekutif sebesar 0,637 > 0,05, dan Komite Audit yaitu sebesar 0,702 > 0,05. dapat disimpulkan bahwa pada variabel koneksi politik, karakter eksekutif, dan komite audit tidak terjadi heteroskedestisitas, dikarenakan nilai signifikan dari tiga variabel tersebut diatas atau lebih besar dari 0,05.

### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat digunakan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara residual pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin Watson*, untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam regresi linier.

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,782 <sup>a</sup>	,611	,389	,291342223713	2,270

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Karakter Eksekutif, No, Koneksi Politik

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Tabel hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,914, terletak diantara dU (1,65) s/d 4-dU (2,35). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan regresi linier yang melibatkan dua atau lebih variabel independen digunakan untuk mengukur pengaruh dari dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah pengaruh antara variabel dependen dan independen. Pada penelitian ini regresi linier dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independent koneksi politik, karakter eksekutif, dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,658	,520		1,264	,215
	Koneksi Politik	,710	,538	,216	1,320	,196
	Karakter Eksekutif	-1,766	,682	-,396	-2,591	,014
	Komite Audit	-,095	,121	-,127	-,782	,440

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

$$Y = 0,658 + 0,710X_1 - 1,766 X_2 - 0,095 X_3 + e_i$$

- a = 0,658 artinya jika Koneksi Politik (X<sub>1</sub>), Karakter Eksekutif (X<sub>2</sub>), dan Komite Audit (X<sub>3</sub>) diasumsikan konstan pada nilai 0, maka variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,658.
- β<sub>1</sub> = 0,710 artinya Koneksi Politik (X<sub>1</sub>) bernilai Positif, dimana terdapat hubungan yang Positif antara koneksi politik (X<sub>1</sub>) dengan Penghindaran Pajak (Y). apabila Koneksi Politik (X<sub>1</sub>) dinaikkan 1 *score* dan variabel lain konstan, maka Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.710.
- β<sub>2</sub> = - 1,766 artinya Karakter Eksekutif (X<sub>2</sub>) bernilai negatif, dimana terdapat hubungan yang negatif antara Karakter Eksekutif (X<sub>2</sub>) dengan Penghindaran Pajak (Y). Apabila Karakter Eksekutif (X<sub>2</sub>) dinaikkan 1 *score* dan variabel lain konstan, maka Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar -1,766.
- β<sub>3</sub> = - 0,095 artinya Komite Audit (X<sub>3</sub>) bernilai negatif, dimana terdapat hubungan yang negatif antara Komite Audit (X<sub>3</sub>) dengan Penghindaran Pajak (Y). apabila Komite Audit (X<sub>3</sub>) dinaikkan 1 *score* dan variabel lain konstan, maka Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,095.

### Uji F

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Koneksi Politik, Karakter Eksekutif, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Model regresi dikatakan dapat menjelaskan secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai Sig. < 0,05 .

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,183	3	,394	3,751	,020 <sup>b</sup>
	Residual	3,365	32	,105		
	Total	4,549	35			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik

Hasil Uji F diatas, dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  3,751 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,020. Berdasarkan nilai tersebut bahwa nilai signifikan 0,020 < 0,05, untuk taraf signifikan 0,05 dan df= 3 serta dengan df yang diperoleh dari perhitungan  $n-k-1 = 36-3-1 = 32$  maka  $F_{tabel} = 2,901$  sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai Signifikannya < dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Koneksi Politik, Karakter Eksekutif, dan Komite Audit secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

### Uji T

Uji t berfungsi untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel dan untuk mengetahui

kemampuan masing-masing variabel independen memiliki hubungan antara variabel dependen. Tingkat signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Berikut beberapa kriteria pengujian hipotesis:

- Apabila nilai signifikansi  $\alpha < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
- Apabila nilai signifikansi  $\alpha > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,658	,520		1,264	,215
	Koneksi Politik	,710	,538	,216	1,320	,196
	Karakter Eksekutif	-1,766	,682	-,396	-2,591	,014
	Komite Audit	-,095	,121	-,127	-,782	,440

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel uji t diatas, maka hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa variabel koneksi politik dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,320 < t_{tabel} 1,69389$  dengan nilai signifikan  $0,196 > 0,05$ . sehingga menunjukkan hasil bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga dapat dikatakan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa variabel karakter eksekutif dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,591 > t_{tabel} 1,69389$  dengan nilai signifikan  $0,014 < 0,05$ . sehingga menunjukkan hasil bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa variabel karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa variabel komite audit dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,782 < t_{tabel} 1,69389$  dengan nilai signifikan  $0,440 > 0,05$ . sehingga menunjukkan hasil bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Maka dapat dikatakan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghitung presentase total variasi dalam variabel terkait yang dijabarkan oleh variabel bebas.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,510 <sup>a</sup>	,260	,191	,324301281041

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik

Hasil uji determinasi ( $R^2$ ) diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,191 yang dapat diartikan bahwa 19,1% Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh Koneksi Politik, Karakter Eksekutif, Komite Audit sedangkan 80,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel pada penelitian ini.

### Pembahasan

- Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa nilai signifikan yang lebih besar dari nilai  $\alpha$ , berarti koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada uji statistik deskriptif nilai rata-rata mendekati nilai maksimum, yang mana nilai tersebut berarti perusahaan tidak terkoneksi politik, sehingga variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,591 > t_{tabel}$  1,69389 dengan nilai signifikan  $0,014 < 0,05$ . Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

c. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,782 < t_{tabel}$  1,69389 dengan nilai signifikan  $0,440 > 0,05$ . Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka variabel independen komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.

### Kesimpulan

Berdasarkan pada *output* dalam penjelasan ini, bahwa mampu ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu koneksi politik, karakter eksekutif, komite audit terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

a. Koneksi Politik

Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa hubungan politik yang ada di dalam perusahaan, baik mereka yang berada di posisi strategis seperti direktur, administrator, komisaris, dan sekretaris yang melakukan bisnis dengan politis atau parlemen pemerintah, tidak menjamin bahwa perusahaan dapat terlibat dalam penghindaran pajak. Perusahaan akan memastikan citra perusahaan yang baik dimata pemerintah, masyarakat, dan investor.

b. Karakter Eksekutif

Karakter Eksekutif memiliki dampak tidak berpengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan melakukan penggelapan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar risiko yang di ambil manajer, semakin rendah kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak.

c. Komite Audit

Karena semakin sedikit komite Audit yang dimiliki perusahaan, semakin sedikit kontrol mereka terhadap kebijakan keuangan. Untuk mencapai ketegasan keuangan, dan jika perusahaan memiliki komite audit yang lebih banyak, pengendalian kebijakan keuangan akan semakin ketat, yang akan mengurangi perilaku manajemen penggelapan pajak.

### Saran

Berikut berupa saran yang dikemukakan berdasarkan kesimpulan diatas:

a. Bagi Investor

Sebagai kebijakan untuk mempertimbangkan dalam investasi modal mereka, investor harus mempertimbangkan terlebih dahulu informasi yang diberikan oleh perusahaan pada laporan tahunan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan semua variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan menambah tahun penelitian dan menambahkan variabel selain yang telah diteliti saat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Amyartha, A. M., & Fidiana. (n.d.). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1.
- Angelina, D., & Hendi. 2021. "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI". *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science, Volume 1 No 1*, 1-15.
- Anggraeni, F., & Yudhistira, A. 2022. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Rasio Keuangan, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Trisakti School of Management, Jakarta*, 1-10.
- Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif,

- Koneksi Politik dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15–26.
- Ardillah, K., & Prasetyo, A. (2021). Executive Compensation, Executive Character, Audit Committee, and Audit Quality on Tax Avoidance. *Akuntabilitas : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 169–186.
- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21.
- Auliya, A. d. 2021. "Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)". *The 14th University Research Colloquium 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap* ISSN: 2621-0584), 1-10.
- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, koneksi politik dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak, 18, 2028–2054.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 5(1), 1–9.
- Chen, H., Tang, S., Wu, D., & Yang, D. (2015). The Political Dynamics of Corporate Tax Avoidance : The Chinese Experience \*, (June 2014).
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Faccio, M. (2006). Politically-Connected Firms. *American Economics Review*. 96(1), 369-386.
- Faccio, M. (2010). Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. *Financial Management*, 39(3), 905–928. <https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2010.01099.x>
- Fitria, Ulan. (2018). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya *Tax Amnesty* (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia BEI Periode 2015-2016). Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.
- Gartika, R. W. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Vol 9 No. 1*, 70-79.
- Ghozali, Iman. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2015. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanlon, M., & Hietzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*. 50,127-178.
- Herryanto, & Tanujaya, K. 2021. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Keahlian Keuangan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI". *Conference on Management, Business, Volume 1 No 1*, 1619-1628.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697.
- Kartikasari, D., & Kresnawati, E. (2021, Desember). Peran Tata Kelola Perusahaan pada Pengaruh Utang dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Reviu akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5, 214.
- Khomsiyah, N. d. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2018". *Jurnal Ecopreneur*. 12, Volume 4, No. 1 (ISSN: 2614-3968 / e-ISSN: 2615-6237), 1-19.

- Low, A. (2006). Managerial Risk-Taking Behavior And Equity-Based Compensation. . *Journal Of Financial Economics* 92(3): , 470-490.
- Mangindaan, D. H., Dan Ramadhan, G. F. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Survei Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2012-2015). *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. 2020. "Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 2 ISSN 2301-4075 ISSN 2716-3849, 1-14.
- Minarta, T. U. 2021. "Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Mining Yang Terdaftar di BEI 2015-2019". *Skripsi*, 1-17.
- Munawaroh, M. A., & Ramdany. 2019. "Peran CSR, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi*, Volume 8, Nomor 2 ISSN 2301-4075, 109-121.
- Murniyana, G. w. 2018. "Pengaruh Koneksi Politik, Harga Transfer, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2015-2017)". *Skripsi*, 1-63.
- Ngabdillah, F. R., & Pratama, B. C. (2022, April). Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen*, 6, 1.
- Nurilla AlKholil, H. P., & Sulistyowati, S. 2022. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kinerja Keuangan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*ISSN: 2963-2730, 772-793.
- Oktamawati, M. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40.
- Pratama, I. A. 2022. "Penghindaran Pajak: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Koneksi Politik, dan Kualitas Audit". *Accounting Student Research Journal*, Vol. 1, No.1, 1-20.
- Pratiwi, I. S. (2017). The Role of Corporate Political Connections in the Relation of CSR and Tax Avoidance : Evidence from Indonesia, 6(1), 345–358.
- Pratomo, D., Dan Triswidyaria, H. 2019. Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. Jakarta: *Gramedia Pustaka Utama*, 8, 688.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, 3(2), 1077–1089.
- Putra , A. F. 2018. "Pengaruh Koneksi Politik dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak". *Skripsi*, 1-106.
- Putri, R. E. 2020. "Pengaruh Intenitas Aset Tetap, Resiko Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI periode 2015-2019)". *Skripsi*, 1-17.
- Putri, A. R. (2012-2016). Pengaruh Risiko Perusahaan Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Properti, real estate, dan Konstruksi bangunan yang terdaftar di bursa efek Indonesia BEI Periode 2012-2016 . *Skripsi*, 1-9.
- Rahmawati, E., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6, 1.
- Rustinawati, S., & Wahyudi, I. 2020. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Riset Perbankan Manajemen dan Akuntansi*, Volume 4 No.1, 1-13.
- Rostiani, S. S., & Sukanta, A. T. (2018, September). Pengaruh Dewan Pengawasan Syariah, Profitabilitas Dan Lavarage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 4, 1225.
- Sahrir, Sultan, & Sofyan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30.
- Salsabila, E. A., & Pratomo, D. (2022). Pengaruh Komite Audit, Karakter Eksekutif Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Kontrol Leverage, Profitabilitas Dan

- Ukuran Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI 2016). *Journal of Management & Business*, 4, 63.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103.  
<https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Sugiyarti, L., & Purwanti, S. M. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi, 5(3), 1625–1641.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: ALFABETA, cv.
- Sulendra Putri, A. R. 2018. "Pengaruh Resiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016". *Skripsi*, 1-9.
- Sutopo, B., Trinugroho, I., & Damayanti, S. M. (2017). Politically Connected Banks: Some Indonesian Evidence. *International Journal of Business and Society*, 18(1), 8394.  
<https://doi.org/10.33736/ijbs.491.2017>.
- Tanujaya, K., & Herryyanto. (2021, February). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Keahlian Keuangan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1, 1619.
- Ummaht, H. R., & Indrawan, R. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak ( Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020). *Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi )*, 6, 447.
- Wulansari, S., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–24.
- Zain, Mohammad. (2008) Manajemen Perpajakan, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.  
[finance.detik.com](http://finance.detik.com)